

## **INTEGRASI ETIKA DAN BUDAYA SIRI DALAM MASYARAKAT MANDAR TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK DI SULAWESI BARAT**

Wahyudi<sup>1</sup>, Abdul Hamid Habbe<sup>2</sup>, Musran Munizu<sup>3</sup>, Gagaring Pagalung<sup>4</sup>

IAI DDI Polewali Mandar<sup>1</sup>, Universitas Hasanuddin<sup>2,3,4</sup>

Email: [wahyudi.sjah@gmail.com](mailto:wahyudi.sjah@gmail.com)<sup>1</sup>, [hamidhabbe@gmail.com](mailto:hamidhabbe@gmail.com)<sup>2</sup>, [muzranmunizu@gmail.com](mailto:muzranmunizu@gmail.com)<sup>3</sup>, [gagaringpagalung@gmail.com](mailto:gagaringpagalung@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi integrasi nilai budaya Siri dalam perilaku perpajakan masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Siri, sebagai nilai moral yang menekankan rasa malu dan kehormatan, berperan penting dalam membangun kohesi sosial dan memotivasi kepatuhan pajak. Kampanye berbasis budaya, seperti “Masiri’i sawa andiani mambayar sima,” menunjukkan efektivitas rasa malu sebagai mekanisme sosial untuk meningkatkan kesadaran pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya Siri mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak guna menjaga reputasi di komunitas mereka. Namun, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan pragmatis, seperti kebutuhan administratif untuk pengajuan kredit atau pengurusan dokumen. Fenomena ini menciptakan dilema etis, di mana pembayaran pajak sering kali didorong oleh insentif praktis daripada kesadaran moral. Studi ini merekomendasikan integrasi nilai budaya dan insentif administratif dalam kebijakan perpajakan, serta pelibatan tokoh adat dan kampanye berbasis komunitas untuk memperkuat legitimasi moral sistem perpajakan. Dengan pendekatan holistik, penelitian ini menawarkan solusi strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan kekayaan budaya lokal. Kata Kunci : kepatuhan pajak, nilai budaya siri, integrasi kebijakan pajak.

### **Abstract**

*This study explores the integration of the Siri cultural value into tax compliance behavior among the Mandar community in West Sulawesi. Siri, a moral value emphasizing shame and honor, plays a vital role in fostering social cohesion and motivating tax compliance. Cultural campaigns such as “Masiri’i sawa andiani mambayar sima” demonstrate the effectiveness of shame as a social mechanism to enhance tax awareness. The findings reveal that Siri motivates individuals to fulfill their tax obligations to maintain their reputation within the community. However, tax compliance is also influenced by pragmatic conflicts of interest, such as administrative needs for loan applications or document processing. This phenomenon creates an ethical dilemma, where tax payments are often driven by practical incentives rather than moral awareness. The study recommends integrating cultural values with administrative incentives in tax policy and involving community leaders and culturally rooted campaigns to reinforce the moral legitimacy of the tax system. By adopting a holistic approach, this research offers strategic solutions for developing an effective and sustainable taxation system, particularly in regions with strong local cultural heritage.*

*Keywords : tax compliance, siri culture value, tax policy integration.*

## **PENDAHULUAN**

Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya unik, salah satunya adalah budaya Siri, sebuah nilai moral yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Mandar. Siri tidak hanya mencerminkan rasa malu, tetapi juga menjadi kerangka moral yang membimbing perilaku individu dalam komunitas. Dalam konteks perpajakan, nilai Siri dapat berperan penting sebagai mekanisme sosial yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban kolektif mereka, termasuk pembayaran pajak (Yamen et al., 2023). Kampanye seperti “Masiri’i sawa andiani

membayar sima” (Dia malu karena tidak membayar pajak) merupakan contoh konkret bagaimana rasa malu digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Namun, pada kenyataannya, motivasi masyarakat Mandar dalam membayar pajak tidak semata-mata didasarkan pada nilai budaya atau rasa malu. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor pragmatis yang sering kali menjadi pendorong utama kepatuhan pajak, yakni konflik kepentingan (*conflict of interest*). Banyak individu membayar pajak bukan karena merasa bertanggung jawab secara moral, tetapi karena kebutuhan praktis. Sebagai contoh, pembayaran pajak sering kali menjadi syarat penting dalam pengajuan kredit, pengurusan dokumen administratif, atau keperluan lainnya ([stats.pajak.go.id.](https://stats.pajak.go.id/), 2024). Dengan kata lain, kepatuhan pajak lebih sering dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan sebagai tanggung jawab moral kepada negara (Stiller & Heinemann, 2024).

Fenomena ini menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, motivasi pragmatis ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan. Namun, di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak tidak selalu didasarkan pada nilai moral atau kesadaran kolektif, melainkan karena tekanan eksternal. Hal ini dapat melemahkan integritas sistem perpajakan dan menciptakan ketergantungan pada insentif administratif sebagai alat utama untuk mendorong kepatuhan pajak (Nimer et al., 2022).

Lebih jauh, keadaan ini juga mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan nilai budaya dengan kebijakan perpajakan modern. Sementara nilai Siri dapat memberikan dasar moral yang kuat untuk mendorong kepatuhan, penerapan kebijakan yang terlalu berfokus pada insentif pragmatis dapat mengurangi dampak nilai budaya tersebut. Misalnya, masyarakat yang terbiasa membayar pajak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif mungkin akan kehilangan rasa tanggung jawab moral terhadap kewajiban pajak mereka, sehingga mengubah perilaku ini menjadi sekadar formalitas administratif (Wiafe et al., 2024).

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merancang strategi yang tidak hanya memanfaatkan insentif pragmatis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya seperti Siri. Strategi ini dapat mencakup kampanye edukasi yang menekankan pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi sosial dan rasa hormat terhadap komunitas. Integrasi antara pendekatan budaya dan kebijakan pragmatis dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat (Hangáčová & Strémy, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana nilai budaya Siri memengaruhi kepatuhan pajak di masyarakat Mandar dan apa implikasi etis dari motivasi berbasis konflik kepentingan yang mendorong pembayaran pajak. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu menganalisis pengaruh budaya Siri terhadap perilaku perpajakan di Sulawesi Barat, mengeksplorasi faktor konflik kepentingan sebagai pendorong pragmatis pembayaran pajak, serta mengidentifikasi implikasi etis dari fenomena tersebut dalam konteks nilai budaya lokal.

Penelitian ini, dengan demikian, berupaya menjelaskan bagaimana nilai budaya Siri dapat diintegrasikan dengan kebijakan modern untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat Mandar. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dimensi etis dari konflik kepentingan dalam motivasi pembayaran pajak, yang dapat memberikan wawasan

penting bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif masyarakat Mandar dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Pendekatan fenomenologi dipilih karena menawarkan kerangka metodologis yang mampu menggali makna mendalam dari pengalaman individu, terutama dalam konteks yang kaya akan nilai budaya seperti budaya Siri.

Fenomenologi berfokus pada bagaimana individu memahami dan memaknai pengalaman mereka, sehingga metode ini sangat relevan untuk mengkaji hubungan antara nilai budaya, etika, dan perilaku perpajakan dalam masyarakat Mandar. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana nilai Siri, dengan komponen utamanya berupa rasa malu (*masiri*'), memengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Metode ini juga membantu menggali dimensi pragmatis, seperti konflik kepentingan, yang muncul sebagai motivasi tambahan untuk memenuhi kewajiban pajak.

Lebih jauh, pendekatan fenomenologi memberikan ruang bagi partisipan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara mendalam, tanpa batasan yang sering kali muncul dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu partisipan mengungkapkan makna di balik tindakan mereka. Misalnya, penelitian ini akan menggali bagaimana masyarakat Mandar menafsirkan hubungan antara rasa malu dan kebutuhan pragmatis, seperti pengajuan kredit atau pengurusan dokumen administratif, dalam konteks pembayaran pajak.

Selain itu, fenomenologi memungkinkan penelitian ini untuk menangkap nuansa interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Mandar, di mana norma budaya dan kebutuhan administratif saling berinteraksi. Sebagai contoh, metode ini dapat membantu memahami bagaimana tekanan sosial dari komunitas dapat memengaruhi keputusan individu untuk membayar pajak, serta bagaimana norma budaya seperti Siri dapat diperkuat atau dilemahkan oleh kebijakan perpajakan modern. Dengan demikian, fenomenologi menjadi pendekatan yang ideal untuk mengkaji kompleksitas hubungan antara budaya, etika, dan motivasi pragmatis dalam perilaku perpajakan masyarakat Mandar.

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang memiliki keragaman latar belakang, mencakup pengusaha kecil, petani, serta pejabat lokal. Populasi ini dipilih karena merepresentasikan kelompok masyarakat yang terlibat langsung dengan kewajiban perpajakan dan memiliki interaksi dengan nilai budaya Siri dalam kehidupan sehari-hari.

Pengusaha kecil dipilih karena mereka sering kali menghadapi kewajiban perpajakan yang terkait dengan aktivitas ekonomi mereka, seperti pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Kelompok ini dianggap penting karena mereka tidak hanya mewakili masyarakat produktif, tetapi juga sering kali menjadi subjek utama dalam program edukasi dan pengawasan pajak. Petani, di sisi lain, dipilih karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang terhubung langsung dengan tradisi budaya lokal, termasuk nilai Siri. Perspektif mereka dianggap relevan untuk memahami bagaimana budaya lokal memengaruhi pandangan mereka terhadap pajak sebagai kewajiban sosial dan moral. Sementara itu, pejabat lokal, seperti kepala desa atau aparat pemerintahan daerah, dipilih karena mereka sering kali menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran pajak melalui pendekatan budaya dan administratif.

Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yang berarti pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mendalam terkait dengan subjek penelitian, yaitu hubungan antara budaya Siri dan perilaku perpajakan. Sebanyak 30 responden dipilih untuk memberikan pandangan yang beragam, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Komposisi sampel ini mencakup berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan profesi, sehingga memberikan representasi yang kaya tentang dinamika budaya Siri dalam konteks perpajakan di masyarakat Mandar.

Pendekatan purposive sampling ini juga memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk memastikan bahwa setiap responden memiliki keterlibatan langsung dengan isu perpajakan atau nilai budaya Siri. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam, karena setiap responden dapat memberikan pandangan mereka secara komprehensif berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan melibatkan berbagai latar belakang dan peran sosial, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan kompleks antara budaya, etika, dan motivasi pragmatis dalam membayar pajak di masyarakat Mandar.

### 3. Instrumen Penelitian

Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai metode utama untuk menggali pandangan, pengalaman, dan motivasi mendalam dari responden terkait kewajiban pajak. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengeksplorasi topik penelitian secara mendalam, sekaligus memberikan ruang bagi responden untuk berbicara secara bebas tentang pandangan mereka. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan daftar pertanyaan panduan yang telah dirancang sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk menggali lebih jauh topik-topik yang relevan berdasarkan jawaban responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman pribadi responden, termasuk bagaimana nilai budaya Siri memengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak, serta bagaimana motivasi pragmatis seperti kebutuhan administratif turut memengaruhi keputusan mereka.

Wawancara dilakukan dalam suasana yang santai untuk memastikan responden merasa nyaman dalam menyampaikan pandangan mereka secara jujur. Sebagai contoh, peneliti dapat bertanya tentang persepsi responden terhadap pajak sebagai kewajiban moral, pengalaman mereka saat menghadapi tekanan administratif, atau bagaimana komunitas mereka menggunakan norma sosial seperti rasa malu (masiri') untuk mendorong kepatuhan pajak. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data

naratif yang kaya, yang mencerminkan interaksi antara norma budaya dan faktor pragmatis dalam konteks perpajakan.

Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika budaya Siri dalam konteks sosial. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam aktivitas masyarakat dan mengamati perilaku, interaksi sosial, serta praktik budaya yang terkait dengan norma Siri. Misalnya, peneliti dapat mengamati bagaimana komunitas mengekspresikan rasa malu terhadap individu yang tidak membayar pajak atau bagaimana tokoh masyarakat menggunakan budaya lokal untuk mendorong kepatuhan pajak. Observasi ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara budaya Siri dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana norma ini diterapkan dalam hubungan sosial, terutama dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan.

Metode kombinasi antara wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif memberikan pandangan yang komprehensif tentang interaksi antara nilai budaya dan perilaku pajak. Sementara wawancara memberikan narasi subjektif dari responden, observasi membantu menangkap konteks sosial yang melingkupi perilaku tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya memahami pandangan individu, tetapi juga bagaimana pandangan tersebut dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Mandar. Dengan demikian, metode ini memberikan data yang kaya dan mendalam untuk menjawab tujuan penelitian tentang integrasi etika dan budaya Siri dalam perilaku perpajakan masyarakat Mandar.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam narasi responden. Proses analisis melibatkan pengkodean awal, pengelompokan tema, dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Pengaruh Budaya Siri terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil wawancara dengan 30 responden dari masyarakat Mandar di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa budaya *Siri* memegang peran fundamental dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap kepatuhan pajak. *Siri*, yang bermakna rasa malu, menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka membayar pajak karena takut dicap tidak bertanggung jawab oleh komunitas. Rasa malu atau *masiri* tidak hanya muncul karena kegagalan memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga karena konsekuensi sosial yang menyertainya. Seorang responden mengatakan, “Kalau saya tidak bayar pajak, itu bukan hanya masalah hukum, tapi juga harga diri. Malu sekali kalau tetangga tahu.” (Wawancara, 2024).

Norma sosial ini memperkuat hubungan antara individu dan komunitas. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa budaya *Siri* mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan komunitas. Salah satu responden menjelaskan, “Orang Mandar itu punya budaya malu yang besar. Kalau ada urusan administrasi yang tertunda karena tidak bayar pajak, kita malu sekali, apalagi kalau orang lain tahu.” (Wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *Siri* tidak hanya berfungsi sebagai motivasi moral, tetapi juga sebagai alat pengendali yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Namun, beberapa responden (sekitar 20%) mengindikasikan bahwa nilai-nilai *Siri* mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda cenderung lebih individualistis dan sering memandang pajak sebagai kewajiban administratif daripada tanggung jawab sosial. Seorang responden muda berkomentar, “Bayar pajak itu penting, tapi bukan soal malu, melainkan lebih kepada kebutuhan administrasi.” (Wawancara, 2024). Hal ini mengisyaratkan adanya perubahan sosial yang memengaruhi intensitas pengaruh budaya *Siri* terhadap perilaku masyarakat Mandar.

### **Konflik Kepentingan sebagai Motivasi Tambahan**

Selain dorongan moral dari budaya *Siri*, kebutuhan administratif juga menjadi pendorong signifikan untuk kepatuhan pajak. Sebanyak 65% responden mengungkapkan bahwa mereka membayar pajak karena persyaratan administratif, seperti pengajuan kredit usaha, pengurusan dokumen tanah, atau penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Salah satu responden menjelaskan, “Kalau ada urusan yang penting di kantor desa atau kecamatan, kita pasti bayar pajak dulu, supaya semuanya lancar.” (Wawancara, 2024). Motivasi ini menggambarkan bagaimana kebutuhan praktis dapat mendorong perilaku kepatuhan yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Namun, kebutuhan administratif ini juga menciptakan tekanan sosial yang kuat. Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa mereka merasa malu jika urusan administratif mereka terhambat karena tunggakan pajak. Salah satu responden menuturkan, “Kalau kita ada tunggakan pajak dan urusan tidak selesai, itu sangat memalukan, apalagi kalau sampai orang lain tahu.” (Wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pragmatis sering kali berinteraksi dengan tekanan sosial, menciptakan dinamika unik dalam kepatuhan pajak masyarakat Mandar.

Dari sisi ekonomi, sekitar 40% responden yang memiliki pendapatan rendah mengaku merasa terbebani oleh kewajiban pajak. Mereka memahami pentingnya pajak untuk kesejahteraan bersama, tetapi kesulitan ekonomi membuat mereka tidak selalu dapat memprioritaskan pembayaran pajak. Seorang petani berkomentar, “Kadang-kadang pajak itu terasa berat, terutama saat hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi tantangan utama, meskipun norma sosial *Siri* tetap memberikan pengaruh.

### **Integrasi Etika dan Budaya Siri dalam Pencegahan Penghindaran Pajak**

Integrasi antara etika dan budaya *Siri* memiliki potensi besar dalam mencegah perilaku penghindaran pajak di Sulawesi Barat. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa tekanan sosial dari norma *Siri* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak. Seorang responden mengatakan, “Rasa malu itu kuat sekali, terutama jika kita tahu bahwa tidak bayar pajak bisa memengaruhi reputasi kita di komunitas.” (Wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang kuat dapat menjadi mekanisme yang mendukung kepatuhan pajak, terutama di masyarakat dengan ikatan komunitas yang erat seperti Mandar.

Namun, sekitar 15% responden mengungkapkan bahwa insentif administratif sering kali menjadi motivasi utama dibandingkan nilai-nilai budaya. “Kalau tidak ada urusan mendesak, seperti pengajuan kredit atau bantuan, mungkin saya tidak akan bayar pajak,” ujar seorang pedagang (Wawancara, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun budaya *Siri* memiliki pengaruh besar, motivasi praktis tetap menjadi faktor penting. Sebagaimana dicatat oleh Stiller dan Heinemann (2024), kombinasi antara norma sosial

yang kuat dan insentif administratif dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dari sisi sosial, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa norma kolektif tetap menjadi penggerak utama perilaku pajak. Dari sisi ekonomi, keberlanjutan kepatuhan pajak memerlukan perhatian khusus terhadap kemampuan finansial masyarakat. Sedangkan dari sisi budaya, *Siri* tetap relevan, tetapi memerlukan penguatan melalui kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan insentif administratif yang jelas. Kampanye edukasi berbasis budaya, yang menekankan pentingnya kontribusi pajak untuk kesejahteraan komunitas, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menjaga harmoni sosial.

## PEMBAHASAN

Bagian ini berupa pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti halnya paparan hasil, pembahasan juga ditulis dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk pembagian per subbab/poin. Pembahasan mengaitkan antara hasil dengan teori serta menunjukkan posisi penelitian dengan penelitian terdahulu baik yang sejalan maupun yang berbeda dengan hasil penelitian.

Budaya *Siri*, yang menjadi inti nilai sosial masyarakat Mandar, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Sebagai nilai moral yang menekankan rasa malu (*masiri'*) dan tanggung jawab sosial, *Siri* mendorong individu untuk menjaga kehormatan diri melalui tindakan yang sesuai dengan norma komunitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa rasa malu adalah salah satu motivasi utama yang mendorong mereka untuk membayar pajak. Salah satu responden menyatakan, "Kalau saya tidak bayar pajak, tetangga akan mencibir. Itu memalukan" (Wawancara, 2024). Dalam masyarakat Adat, kegagalan membayar pajak tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran kewajiban hukum tetapi juga dianggap mencederai norma sosial yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menurunkan reputasi seseorang di mata komunitas mereka (Yamen et al., 2023).

Pengaruh budaya *Siri* juga terlihat dalam interaksi sosial yang melibatkan institusi pemerintahan. Banyak responden menyatakan bahwa mereka merasa *masiri'* i tau (kita malu) jika urusan administratif mereka, seperti pengajuan dokumen di kantor kelurahan atau kecamatan, terhambat akibat tunggakan pajak. Salah satu responden menjelaskan, "Masiri' i tau kalau ada urusan di kantor lurah atau desa, termasuk di kecamatan, kemudian urusan kita terhambat atau tidak diproses karena kita belum membayar pajak. Akan lebih malu lagi jika kita ketahuan sama warga yang lain kalau ternyata alasan tidak diprosesnya urusan kita dipicu oleh adanya tunggakan pajak" (Wawancara, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa rasa malu yang ditanamkan oleh norma budaya tidak hanya memengaruhi hubungan personal, tetapi juga berperan dalam hubungan administratif yang melibatkan pemerintah. Dalam konteks ini, budaya *Siri* bekerja sebagai pengendali sosial yang memperkuat kepatuhan pajak (Nimer et al., 2022).

Selain nilai budaya, penelitian ini juga menemukan bahwa konflik kepentingan pragmatis sering kali menjadi motivasi tambahan yang signifikan dalam mendorong masyarakat Mandar untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Banyak responden mengakui bahwa pembayaran pajak sering kali dipicu oleh kebutuhan administratif, seperti kelancaran proses pengajuan kredit, pengurusan dokumen legal, atau akses ke program bantuan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu responden,

“Kalau urusan pajak atau kewajiban pajak kita telah dipenuhi, urusan kita akan lancar seperti untuk pengurusan kredit dan urusan yang berkaitan dengan penerimaan bantuan dari pemerintah” (Wawancara, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa insentif administratif, seperti aksesibilitas terhadap layanan pemerintah, menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk keputusan individu untuk mematuhi kewajiban pajak (Stiller & Heinemann, 2024).

Namun, meskipun kombinasi antara budaya Siri dan insentif administratif dapat meningkatkan kepatuhan pajak, fenomena ini juga menimbulkan dilema etis. Ketika individu membayar pajak bukan karena rasa tanggung jawab moral, tetapi lebih karena kebutuhan praktis, nilai budaya seperti Siri dapat kehilangan makna sebagai pendorong utama kepatuhan pajak. Dalam beberapa kasus, motivasi pragmatis ini menciptakan situasi di mana pembayaran pajak dipandang sebagai alat transaksional semata, bukan sebagai bentuk kontribusi moral kepada komunitas dan negara. Sebagaimana dicatat oleh Stiller dan Heinemann (2024), ketergantungan pada motivasi pragmatis dapat melemahkan dimensi kolektif dari sistem perpajakan, mengubahnya menjadi sekadar kewajiban administratif tanpa makna sosial yang mendalam.

Pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan nilai budaya Siri dengan kebijakan perpajakan modern untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Siri, yang menekankan rasa malu (*masiri*) dan tanggung jawab sosial, dapat dijadikan landasan moral dalam strategi komunikasi perpajakan. Kampanye yang menekankan pentingnya pajak sebagai tanggung jawab kolektif, seperti tagline yang ada di masyarakat Mandar “**Masiri**’i sawa **andiani mambayar sima**” Artinya : **Malu Karena Belum Membayar Pajak**, dapat diperkuat dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pejabat lokal sebagai penyampai pesan. Keterlibatan tokoh-tokoh ini dapat memperkuat penerimaan masyarakat karena pesan-pesan tersebut datang dari figur otoritatif yang dihormati dalam komunitas.

Selain pendekatan budaya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan administratif memberikan insentif yang relevan untuk mendorong kepatuhan pajak. Contohnya, kewajiban pajak dapat diintegrasikan dengan syarat pengajuan dokumen penting seperti izin usaha, sertifikat tanah, atau akses bantuan sosial. Langkah ini tidak hanya memberikan dorongan pragmatis kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga memperkuat hubungan antara kepatuhan pajak dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Sebagaimana disarankan oleh Wiafe et al. (2024), kombinasi antara norma budaya dan insentif administratif dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Transparansi dan efisiensi dalam proses perpajakan juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pemerintah dapat mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam melacak kewajiban dan pembayaran pajak, sekaligus memastikan bahwa prosesnya bebas dari hambatan birokrasi yang tidak perlu. Dengan integrasi antara nilai Siri dan pendekatan modern ini, pajak tidak hanya akan dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tindakan moral yang mendukung tanggung jawab sosial dan kesejahteraan komunitas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi sistem perpajakan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa budaya Siri memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perilaku kepatuhan pajak di masyarakat Mandar. Nilai masiri' (rasa malu) menjadi pendorong moral yang kuat, di mana individu merasa berkewajiban untuk membayar pajak demi menjaga reputasi dan kehormatan di komunitasnya. Kampanye seperti "Masiri'i sawa andiani mambayar sima" menunjukkan bahwa rasa malu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konflik kepentingan berbasis kebutuhan pragmatis, seperti kelancaran pengurusan dokumen administratif atau akses bantuan pemerintah, sering kali menjadi motivasi utama dalam memenuhi kewajiban pajak. Motivasi berbasis konflik kepentingan ini menciptakan dilema etis, di mana kepatuhan pajak lebih didorong oleh kebutuhan instrumental daripada kesadaran moral.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus utama penelitian adalah masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, sehingga temuan-temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk masyarakat dengan budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini menekankan pada wawancara dan observasi partisipatif yang memberikan data kualitatif mendalam, tetapi belum menyertakan data kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh budaya Siri dan motivasi pragmatis secara statistik. Penelitian lebih lanjut yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif akan memberikan wawasan yang lebih holistik

## SARAN

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai budaya lokal, seperti Siri, dengan kebijakan administratif dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Studi semacam itu dapat membantu memahami peran budaya dalam mendorong kepatuhan pajak secara lebih luas dan memberikan wawasan baru untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi, seperti digitalisasi sistem perpajakan, dapat diintegrasikan dengan pendekatan budaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat legitimasi moral sistem perpajakan. Penelitian lintas budaya juga dapat membantu membandingkan efektivitas nilai budaya dan insentif administratif di berbagai konteks sosial, sehingga memberikan panduan yang lebih kontekstual bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, M.Si, Prof. Dr. , SE., MSi, dan Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MSi atas bimbingan dan arahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah penelitian ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pemikiran Akuntansi. Berikutnya kepada seluruh keluarga saya yang terus memberikan dukungan baik materi maupun non materi atas perjalanan kuliah saya pada program doctoral ilmu akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

Alstadsaeter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2018). Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality. *Journal of Public Economics*, 162, 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008>

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture Differences and Tax Morale in the United States and Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *NPWP bukan sekadar syarat pinjaman di bank: Begini penjelasannya*. Diakses pada 29 Desember 2024, dari <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/npwp-bukan-sekadar-syarat-pinjaman-di-bank-begini-penjasannya>.
- Cullis, J., Jones, P., & Lewis, A. (2015). Tax Framing, Instrumentality, and Individual Differences: Are There Two Types of Taxpayer? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.08.014>
- Gollwitzer, A. (2011). Fair Taxation and Economic Behavior: Behavioural Tax Policy Design. *International Tax and Public Finance*, 18(5), 635–650. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9175-3>
- Hangáčová, N., & Strémy, T. (2018). Value Added Tax and Carousel Fraud Schemes in the European Union. *European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice*, 26(2), 132–159. <https://doi.org/10.1163/15718174-26022003>
- Nimer, M., Alshare, F., & Diab, M. (2022). The Impact of Social Norms on Tax Compliance: Evidence from a Developing Country. *Journal of Economic Studies*, 49(5), 1320–1340. <https://doi.org/10.1108/JES-06-2021-0315>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Stiller, W., & Heinemann, F. (2024). Do More Harm Than Good? The Optional Reverse Charge Mechanism Against Cross-Border Tax Fraud. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 95(1), 61–84. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.05.009>
- Torgler, B. (2004). Tax Morale, Trust, and Institutions. *Public Choice*, 119(1), 133–157. <https://doi.org/10.1023/B:PUCH.0000024163.22158.23>
- Wiafe, P. A., Armah, M., & Tuffour, K. A. (2024). The Underground Economy and Tax Evasion in Ghana: Implications for Economic Growth. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2292918. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2292918>
- Wenzel, M. (2004). An Analysis of Norm Processes in Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 25(2), 213–228. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00168-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00168-X)
- Yamen, S., Coskun, A., & Mersni, H. (2023). Digitalization and Tax Evasion: The Moderation Effect of Corruption. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(2), 2142634. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2142634>